



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



BULETIN



KEMENKUM KALSEL NEWS

MINGGU KE-

2

AGUSTUS 2025



SENAM DAN JALAN
SANTAI



DONOR DARAH
KEMENKUM KALSEL



UP CARA HUT RI KE-80

DIVISI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PEMBINAAN HUKUM

DIVISI
PELAYANAN HUKUM

BAGIAN
TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id

Belajar dari Cerita Kentang dan Telur: Pesan Inspiratif Kadiv Yankum di Apel Pegawai Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Apel Pegawai yang berlangsung pada Senin (11/08) pagi. Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan di ikuti Kepala Kantor Wilayah, Alex Cosmas Pinem, Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana serta seluruh pegawai di Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Dalam amanatnya, Meidy Firmansyah menyampaikan motivasi kepada seluruh pegawai melalui perumpamaan “cerita kentang dan telur.” Ia mengibaratkan bahwa setiap pegawai pasti menghadapi tantangan dan permasalahan dalam bekerja maupun kehidupan sehari-hari.

“Harapannya, kita bisa seperti telur yang awalnya rapuh, namun seiring waktu dan proses, justru menjadi kuat ketika menghadapi tekanan,” ujarnya memberi semangat.

Selain motivasi, Meidy juga menekankan pentingnya menjaga sinergi dan kolaborasi di lingkungan kerja.

“Kinerja optimal hanya akan terwujud apabila kita saling mendukung dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Apel pegawai ini menjadi sarana untuk memperkuat disiplin, komunikasi, dan kebersamaan di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel, sekaligus memupuk semangat pengabdian dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara. (Humas Kemenkum Kalsel, teks dan foto : Humas ed : Eko/Mahdi)

Debat RUU KUHAP, Wamenkum Sebut RUU KUHAP Melindungi HAM dari Kesewenang-wenangan Negara



Yogyakarta - Wakil Menteri Hukum RI (Wamenkum), Edward O. S. Hiariej, menghadiri diskusi dan debat terbuka RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama advokat dan aktivis hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar, Sabtu (09/08/2025) di area Masjid Baitul Qohar, Yayasan Badan Wakaf, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Dalam debat itu, Wamenkum menjelaskan bahwa filosofis hukum acara pidana bukanlah untuk memproses tersangka, melainkan untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara. Oleh karena itu, RUU KUHAP yang sedang dibahas ini diformulasikan dengan sedemikian rupa agar tidak mengutamakan satu pihak dan meninggalkan pihak yang lain.

“Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai hak korban, hak tersangka, hak perempuan, hak saksi, hak disabilitas, itu semua akan kita tampung karena pengarusutamaan dari filosofis hukum pidana tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan individu,” kata Wamenkum alias Prof. Eddy.

Eddy mengungkapkan di dalam hukum acara pidana terdapat dua kepentingan yang bertentangan, yaitu pihak pelapor dan pihak terlapor. Sehingga hukum acara pidana harus diramu secara netral, dalam pengertian di satu sisi ada kewenangan aparat penegak hukum, namun di sisi lain kewenangan tersebut harus dikontrol supaya menjadi hak-hak asasi manusia.

“Untuk mencegah supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga, dalam usulan pemerintah kita mengatakan bahwa untuk menyeimbangkan antara kewenangan polisi dan jaksa yang begitu besar, tidak lain dan tidak bukan kita harus memperkuat dan memposisikan advokat ini sederajat dengan polisi dan jaksa,” ujarnya.

Dalam RUU KUHAP, kata Eddy, advokat memainkan peran yang penting dan bersifat imperatif. Artinya, setiap orang yang diproses secara hukum wajib didampingi oleh advokat, mulai tahap penyelidikan. Advokat berhak mengajukan keberatan dan dicatatkan dalam berita acara pemeriksaan.

“Peran advokat sangat sentral karena mulai seseorang ketika dipanggil, belum masuk ke penyidikan, ketika dia dipanggil untuk diminta klarifikasi atau keterangan pada tahap penyelidikan itu dia wajib didampingi oleh advokat. Advokat tidak hanya duduk diam di situ. Satu, dia berhak mengajukan keberatan. Kedua, keberatan itu dicatatkan dalam berita acara sehingga penyelidikan itu akan terlihat oleh umum,” ucap Eddy.

Sementara itu, Haris Azhar menyoroti judicial scrutiny atau yang ia sebut sebagai pengawasan terhadap kinerja aktor penegak hukum. Menurutnya, sudah puluhan tahun hukum acara pidana Indonesia tidak digunakan secara profesional dan proporsional. Ia pun menjelaskan bahwa KUHAP yang saat ini digunakan tidak ‘up to date’, baik dari sisi peristilahannya, konsep pidananya, hingga kurang kuatnya restorative justice. Maka momentum akan berlakunya KUHP yang baru, perlu diimbangi juga dengan KUHAP yang baru.

Ia juga mengusulkan pengungkapan kebenaran dimulai dari tahap penyelidikan. Maksudnya adalah sebuah laporan mengenai apakah suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan, entah itu karena ketiadaan barang bukti atau karena termasuk restorative justice. Dan jika perkara itu telah selesai, maka laporan fakta atau kebenaran itu dapat menjadi pembelajaran.

“Dia harus berbasis kepada kebenaran, ada truth yang diungkap, meskipun dia masih di penyelidikan, karena penyelidikan pun sudah makan duit negara. Dilanjutkan atau dihentikan atas dasar ketiadaan alat bukti atau karena dia restorative justice, maka dia harus memproduksi suatu laporan truthnya itu, faktanya. Bisa tidak dia menjadi suatu standar kaidah yang masuk dalam KUHAP yang akan diterbitkan segera ini?” usul Haris.

Menanggapi diskusi tersebut, Wamenkum mengakui bahwa KUHAP yang sementara berlaku lebih fokus pada kewenangan aparat penegak hukum, bukan pada perlindungan HAM. Oleh sebab itu, RUU KUHAP disusun dengan prinsip *due process of law* yang menjamin dan melindungi hak-hak individu, serta memastikan aparat penegak hukum menjalankan aturan yang termuat di dalam KUHAP.

Eddy juga setuju akan perlunya pengungkapan kebenaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Haris Azhar. Menurut Eddy, pengungkapan kebenaran diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Dengan adanya laporan fakta, jika seseorang kedapatan melakukan tindakan pidana yang kedua kalinya, maka ia tidak bisa mendapatkan *restorative justice* lagi.

“Benar yang dikatakan Bang Haris, pengungkapan kebenaran itu harus ada. Karena kalau tidak kan dia tidak tahu dia benar atau salah. Nanti kasian itu korban tidak mempunyai kepastian hukum. Harus ada suatu pengungkapan kebenaran supaya ketika dia melakukan perbuatan pidana lagi, tidak bisa lagi direstorasi karena sudah lebih dari satu kali. Jadi ada pembatasan-pembatasan terhadap pemberlakuan suatu perkara untuk dilakukan restorasi. Jadi tidak bisa seenaknya,” kata Eddy.

Diskusi dan debat terbuka ini merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat serta pemerintah dalam menggali masukan dari berbagai elemen masyarakat. Wamenkum mengatakan bahwa RUU KUHAP masih terbuka untuk diperdebatkan, bahkan DPR berencana untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum untuk menerima aspirasi masyarakat. Kementerian Hukum pun melakukan inventarisasi masukan yang rinci dan jelas, mencakup pihak siapa yang memberikan masukan apa di tanggal berapa.

“Kita punya catatan yang rapi bahwa ini masukan dari siapa, kita akomodasi seperti ini, mengapa usulan ini tidak kita akomodasi, apa dasar pertimbangannya. Kami dari pemerintah dan DPR wajib untuk mendengarkan masukan, wajib untuk mempertimbangkan, kemudian dalam pertimbangan kita kenapa tidak digunakan usulan ‘A’ tapi kita menggunakan usulan ‘B’, itu kita wajib untuk menjelaskan kepada publik. Itu adalah arti dari *meaningful participation*,” ucapnya.



Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan debat terbuka RUU KUHAP yang menghadirkan pandangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, advokat, dan pegiat HAM. Forum seperti ini penting untuk memastikan bahwa pembaruan hukum acara pidana benar-benar mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan kewenangan aparat penegak hukum.



© Copyright | Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan S

Menteri Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Musik Wajib, Bukan Pajak



Jakarta – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa pembayaran royalti musik adalah kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan bukan merupakan pajak atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Seluruh dana yang terkumpul dari royalti wajib disalurkan 100 persen kepada pencipta, musisi, produser, atau pihak lain yang berhak, dengan pengecualian biaya operasional lembaga pemungut.

“Pembayaran royalti bukan kebijakan baru, ini amanat undang-undang. Tidak ada satu rupiah pun yang masuk ke kas negara. Semua disalurkan kepada yang berhak. Jadi jangan samakan dengan pajak,” ujar Supratman dalam wawancara di program Naratama Kompas.com.

Menteri Hukum memaparkan, saat ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mampu mengumpulkan royalti hingga sekitar Rp270 miliar per tahun. Namun, potensi sesungguhnya diperkirakan bisa mendekati Rp3 triliun, jauh di atas capaian negara-negara tetangga seperti Malaysia yang telah berhasil mengumpulkan hingga Rp600 miliar per tahun.

Ia juga menyoroti kesalahpahaman publik bahwa pembayaran royalti membebani konsumen. “Royalti itu kecil sekali nilainya. Tidak akan membuat harga kopi atau makanan di kafe melonjak. Ini murni penghargaan terhadap hak cipta, bagian dari falsafah kita menghargai karya orang lain,” tegasnya.

Menanggapi maraknya sentimen negatif dan boikot terhadap musik Indonesia oleh sebagian pelaku usaha, Supratman menegaskan bahwa kewajiban membayar royalti berlaku untuk semua karya, termasuk karya internasional. “Mau putar lagu luar negeri pun tetap wajib bayar royalti. Kita ini bagian dari WIPO, dan sekarang Indonesia sedang mengusulkan Protokol Jakarta untuk memudahkan penarikan royalti dari platform internasional,” jelasnya.

Kementerian Hukum, lanjut Supratman, juga tengah memperkuat sosialisasi dan literasi publik, termasuk lewat media sosial, kampus, dan komunitas, agar masyarakat memahami bahwa royalti adalah bentuk penghormatan terhadap kerja kreatif. Ia mendorong LMK agar transparan dalam pelaporan, audit, dan penyaluran dana royalti.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. “Kanwil siap menjadi garda depan dalam menyosialisasikan pentingnya pembayaran royalti, khususnya di daerah. Kami akan menggandeng pelaku usaha, komunitas musik, dan pemerintah daerah agar kesadaran ini tumbuh dari bawah,” ujarnya.

Alex menegaskan bahwa penegakan hukum akan mengedepankan pendekatan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan langkah pidana diambil jika pelanggaran dilakukan secara berulang dan disengaja. “Prinsipnya, ini bukan untuk mempersulit usaha, tapi untuk melindungi dan memajukan industri kreatif,” tandasnya.

Sinergi Harmonisasi Ranperda HSS, Kanwil Kemenkum Kalsel Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Berkualitas



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang membahas dua agenda strategis, yaitu Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Hulu Sungai Selatan (Perseroda). Rapat berlangsung pada Senin (11/08) di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten HSS, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Zulkipli; Asisten Administrasi Umum, Efran; Kepala BKPSDM, Kamidi; Inspektur Daerah, kepala perangkat daerah terkait, serta pimpinan PT. BPR Hulu Sungai Selatan (Perseroda) dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten HSS.

Ranperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah disusun untuk menyesuaikan nomenklatur, menggabungkan beberapa urusan, dan menetapkan tipe perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal bertujuan memperkuat permodalan PT. BPR Hulu Sungai Selatan, mendukung ekspansi layanan kredit, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penambahan modal sebesar Rp6,89 miliar secara bertahap.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana menegaskan pentingnya forum dalam rapat harmonisasi sebagai sarana memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Proses harmonisasi tidak hanya mengkaji substansi hukum, tetapi juga memastikan regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan,” ucap Alex.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten HSS, Zulkipli, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan Kanwil Kemenkum Kalsel.

“Harmonisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan Ranperda yang kami susun tidak hanya sesuai ketentuan hukum, tetapi juga selaras dengan kebutuhan dan kondisi riil di daerah. Harapannya, regulasi ini dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ungkapnya.

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan pembahasan yang dipandu oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Setiap pasal dalam kedua Ranperda dibahas secara rinci, mulai dari kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, konsistensi istilah hukum, hingga implikasi penerapan di lapangan. Perwakilan Pemerintah Kabupaten HSS secara aktif memberikan penjelasan atas latar belakang penyusunan, sementara tim Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan masukan teknis untuk memperkuat aspek normatif dan memperjelas substansi. Diskusi juga mencakup penyesuaian redaksional agar peraturan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kakanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Ranperda Perangkat Daerah dan Penyertaan Modal, Pemkab HSS Akan Bawa ke Tahap Lanjutan



Banjarmasin, Humas_Info – Usai melalui proses pembahasan yang intensif dan konstruktif, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) secara resmi menyerahkan hasil harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kepada Pemerintah Kabupaten HSS. Kedua Ranperda tersebut adalah Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Hulu Sungai Selatan (Perseroda).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, yang hadir langsung dalam rapat harmonisasi bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten HSS, Zulkipli, di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel, Senin (11/08).

Alex Cosmas Pinem menyampaikan bahwa hasil harmonisasi ini telah melalui pengkajian mendalam oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, konsisten secara redaksional, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

“Kami berharap dokumen hasil harmonisasi ini dapat menjadi landasan kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya, sehingga nantinya lahir produk hukum daerah yang implementatif, akuntabel, dan bermanfaat nyata bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan,” ujarnya.



Mewakili Pemerintah Kabupaten HSS, Zulkipli mengapresiasi kinerja Kanwil Kemenkum Kalsel yang telah memberikan pendampingan intensif sejak awal proses harmonisasi.

“Hasil harmonisasi ini akan segera kami tindaklanjuti dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kami meyakini, dengan masukan dan penyesuaian yang telah diberikan, Ranperda ini akan menjadi produk hukum yang berkualitas, sesuai kebutuhan daerah, dan mampu memberikan dampak positif bagi pelayanan publik maupun perekonomian,” ungkapnya.

Dengan penyerahan hasil harmonisasi ini, Pemkab HSS selanjutnya akan memproses kedua Ranperda tersebut melalui mekanisme pembentukan peraturan daerah bersama DPRD setempat, hingga ditetapkan menjadi regulasi yang sah dan mengikat.



Dorong Nilai Ekonomi, Bappelitbangda HSS Koordinasi Tindak Lanjut IG Kayu Manis Loksado



Banjarmasin, KI_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima kunjungan dari perwakilan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Senin (11/08/2025). Kunjungan ini berlangsung di Ruang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi bersama Tim Layanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel serta tim BAPPELITBANGDA Hulu Sungai Selatan.

Agenda utama koordinasi adalah membahas rencana tindak lanjut pasca pemeriksaan substantif Indikasi Geografis (IG) Kayu Manis Loksado.

Dalam kesempatan tersebut, Riswandi menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dan komitmen BAPPELITBANGDA dalam mendorong perlindungan kekayaan intelektual daerah. Ia menegaskan bahwa perlindungan IG merupakan salah satu upaya strategis untuk menjaga kualitas, reputasi, dan nilai ekonomi produk khas daerah.

Perwakilan BAPPELITBANGDA Hulu Sungai Selatan mengungkapkan harapannya agar keberadaan IG Kayu Manis Loksado dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan harga jual di pasaran. Selain itu, kedua pihak juga membahas langkah-langkah lanjutan yang akan ditempuh untuk memastikan keberlanjutan perlindungan dan pemanfaatan IG tersebut setelah tahap pemeriksaan substantif.

Koordinasi ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam memperkuat posisi Kayu Manis Loksado sebagai salah satu komoditas unggulan Kalimantan Selatan di pasar nasional maupun internasional.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Rapat Optimalisasi Aplikasi P2MA



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti Rapat Pembahasan Optimalisasi Aplikasi Penyimpanan Publikasi Kerja Sama (P2MA) yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum secara hybrid pada Senin (11/08). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, beserta jajaran Tim Kerja Humas, Kerja Sama, TI, dan Layanan Pengaduan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, ini membahas langkah-langkah optimalisasi pemanfaatan Aplikasi P2MA sebagai platform resmi penyimpanan dan publikasi data kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum. Aplikasi yang dapat diakses melalui p2ma.kemenkum.go.id ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, memudahkan monitoring dan evaluasi, serta memastikan keterbukaan informasi kerja sama kepada publik.

Dalam paparannya Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun menyampaikan bahwa optimalisasi P2MA mencakup pemanfaatan fitur rencana kerja sama, perumusan naskah, dan evaluasi, sekaligus mengatasi kendala teknis yang sempat terjadi akibat gangguan server pada akhir 2024 hingga pertengahan 2025. Saat ini, aplikasi telah kembali beroperasi dengan jaringan Pusdatin dan menyesuaikan nomenklatur baru Kementerian Hukum.

Rustam Sakka menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap mendukung penuh pengelolaan data kerja sama melalui P2MA.

“Kami akan memastikan seluruh data kerja sama yang dimiliki Kanwil tersimpan rapi, terpublikasi dengan baik, dan dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk kepentingan internal maupun informasi bagi masyarakat,” ujarnya.

Dengan adanya optimalisasi ini, diharapkan P2MA dapat menjadi sumber data yang andal, mutakhir, dan transparan, sekaligus memperkuat koordinasi antara unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, khususnya di bidang kerja sama.



Kanwil Kemenkum Kalsel dan Biro Hukum Setda Kalsel Rumuskan Rekomendasi Anev Perda



Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi (Anev) Peraturan Daerah (Perda), Senin (11/8) di ruang rapat Biro Hukum Setda Kalsel.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Hukum Setda Kalsel, Guntur Ferry Fahrar, yang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), serta Tim Kerja Anev Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, dalam sambutannya menyampaikan tiga poin penting. Pertama, memperkenalkan diri sebagai pejabat baru di Kanwil Kemenkum Kalsel sekaligus menegaskan kesiapan mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Kedua, memaparkan pelaksanaan analisis dan evaluasi Perda terkait Pengelolaan Lahan yang tengah berlangsung, dan mengharapkan masukan dari Biro Hukum sebagai pemangku kepentingan. Ketiga, menyampaikan rencana pendirian 2.015 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kalsel dan mengharapkan dukungan pemerintah provinsi melalui surat arahan Gubernur kepada bupati/wali kota.

Rapat ini turut dihadiri oleh pejabat manajerial dan fungsional dari Kanwil Kemenkum Kalsel serta jajaran Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel dapat semakin erat, sehingga proses pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah berjalan lebih optimal dan berdampak positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan.



Kakanwil Kemenkum Kalsel Gelar Coffee Morning Bahas Agenda Strategis Pekan Ini



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama menggelar coffee morning selepas apel pagi pada Senin (11/08/2025) di Taman WBK Kantor Wilayah. Kegiatan ini menjadi ruang santai namun produktif untuk berdiskusi mengenai sejumlah agenda strategis pekan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum menyampaikan rencana pelaksanaan jalan santai dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80. Selain itu, dibahas pula agenda kegiatan Divisi Pelayanan Hukum (Yankum) yang akan dilaksanakan selama satu minggu ini.

Kakanwil juga memaparkan rencana audiensi ke Gubernur Kalimantan Selatan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta rencana audiensi dengan Kapolda Kalimantan Selatan terkait Surat Perjanjian Penggunaan Bersama.

Melalui coffee morning ini, jajaran pimpinan berupaya memastikan setiap agenda dapat terlaksana secara terencana dan terkoordinasi, sekaligus memperkuat sinergi internal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Kalimantan Selatan.





Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi dan Pendampingan Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti secara daring kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) di Wilayah Tahun 2025 pada Selasa (12/08/2025). Kegiatan yang diselenggarakan oleh BSK Hukum Kementerian Hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh Kantor Wilayah dalam melaksanakan DSK sebagai sarana advokasi, diseminasi, dan sosialisasi hasil Analisis Strategi Implementasi maupun Evaluasi Dampak Kebijakan terhadap suatu Peraturan Menteri.

Dalam paparannya, BSK Hukum menekankan bahwa DSK merupakan forum penting untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan, sekaligus mendorong partisipasi publik. Pelaksanaan DSK di Wilayah akan digelar secara hybrid mulai 26 Agustus hingga 30 Oktober 2025, dengan Kanwil Kemenkum Kalsel dijadwalkan menjadi tuan rumah pada 30 Oktober 2025.

Melalui kegiatan ini, setiap Kanwil diharapkan membentuk Tim Pelaksana, menyusun Term of Reference (ToR), mempublikasikan poster kegiatan minimal H-7, serta melaporkan hasil kegiatan kepada BSK Hukum paling lambat tujuh hari setelah pelaksanaan. Kegiatan juga melibatkan tiga narasumber yang berasal dari unsur internal dan eksternal, serta dibuka oleh pimpinan tinggi BSK Hukum dan Kanwil terkait.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan DSK 2025 berjalan optimal, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan hukum di daerah.





Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Pemanfaatan AI Untuk Pengembangan Kompetensi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan berpartisipasi aktif dalam Webinar Nasional bertema “Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam Pengembangan Kompetensi: Peluang dan Tantangan” yang diselenggarakan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah secara virtual, Selasa (12/08/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Diklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, dan menghadirkan dua narasumber utama, yakni Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, Achmad Iqbal Taufiq, serta Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Bandung, Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Dalam paparannya, Achmad Iqbal Taufiq membahas perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era teknologi dan kecerdasan buatan, termasuk isu kepemilikan karya AI, tantangan etika, serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Ia menegaskan bahwa menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, pencipta adalah manusia, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa intervensi manusia tidak dapat dilindungi hak cipta dan masuk domain publik.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital RI memaparkan strategi memanfaatkan AI untuk pembelajaran dan pengembangan kompetensi, termasuk pemanfaatan AI sebagai alat bantu analisis, personalisasi materi, dan peningkatan efisiensi proses belajar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, melalui jajarannya, mendukung penuh kegiatan ini dan menginstruksikan seluruh pegawai, khususnya CPNS, untuk mengikuti webinar.

“Pemanfaatan AI tidak hanya relevan bagi sektor teknologi, tetapi juga penting bagi peningkatan kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.

Dengan memahami peluang dan tantangannya, kita dapat mengoptimalkan teknologi ini sekaligus menjaga aspek hukum dan etika,” ujarnya.

Webinar ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang membahas studi kasus, regulasi terbaru, serta praktik terbaik pemanfaatan AI. Seluruh peserta mendapatkan sertifikat sebagai bukti partisipasi.



Gelaran 'Funminton' Warnai Semarak Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman dan HUT RI ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Funminton, yaitu pertandingan bulu tangkis kategori pemula yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan semangat sportivitas antar pegawai pada Selasa (12/08).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Bulu tangkis Kanwil Kementerian Hukum Kalsel tersebut diikuti 32 pasangan ganda campuran yang berasal dari Kanwil Kementerian Hukum Kalsel, Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalsel, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel, dan Kanwil Hak Asasi Manusia Kalsel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, turut hadir menyaksikan jalannya pertandingan. Serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana turut ambil bagian menjadi peserta Funminton.

Pertandingan berlangsung dalam suasana penuh kegembiraan dan keakraban, sejalan dengan konsep “fun” yang diusung panitia. Meski demikian, para peserta tetap menunjukkan antusiasme dan semangat juang di lapangan.

Hasil pertandingan hari ini menetapkan pasangan Fahmi dan Mutia dari PPNPN serta Ajie Prasetyo dan Rizqi Fitriana dari Kementerian Hukum sebagai finalis. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 22 Agustus 2025 mendatang.

Kakanwil Kemenkum Kalsel mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan antar pegawai lintas unit kerja.

“Selain untuk memperingati Hari Pengayoman dan HUT RI, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana membangun kekompakan dan menumbuhkan semangat positif di lingkungan kerja,” ujar Alex.



Kemenkum Kalsel Bersama BRIDA Tingkatkan Daya Saing Kayu Manis Loksado di Pasar Global



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti kegiatan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) terkait pengembangan Indikasi Geografis (IG), Selasa (12/8/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan dihadiri oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta tim.

Narasumber kegiatan, Riyadil Jinan, S.T., M.T., Analis Kebijakan Ahli Muda Direktorat Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, menyampaikan pentingnya Indikasi Geografis sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produk lokal di pasar global. Melalui fasilitasi BRIDA, pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan IG dengan mempermudah prosedur administratif dan teknis untuk memperoleh pengakuan.

Fokus pembahasan kali ini adalah pengembangan IG Kayu Manis Loksado, yang diharapkan mampu menarik minat pasar domestik dan internasional. Riyadil menekankan beberapa langkah penting untuk mencapai pengakuan IG, seperti pemahaman regulasi pendaftaran IG, strategi peningkatan kualitas produk, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, industri, hingga masyarakat.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Riswandi, mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Indikasi Geografis adalah peluang besar bagi daerah untuk mem-branding produk unggulannya. Kayu Manis Loksado memiliki potensi luar biasa, dan melalui sinergi BRIDA, pemerintah, dan masyarakat, kita optimis dapat memberikan nilai tambah sekaligus melindungi kekhasan produk tersebut,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengembangan IG Kayu Manis Loksado dapat segera terealisasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mempertahankan warisan budaya lokal.



Setetes Darah, Sejuta Harapan: Donor Darah Sebagai Momen Berbagi di Hari Pengayoman ke-80 di Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80 Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Donor Darah pada Rabu (13/8) di Balai Pertemuan Garuda.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, hadir langsung membuka kegiatan, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenkum Kalsel, Herlina Alex Cosmas.

Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-80.

“Donor darah memiliki manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi penerima darah, tetapi juga bagi para pendonornya. Melalui kegiatan ini, kita turut berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa sekaligus menjaga kesehatan diri,” ungkap Alex.

Kegiatan ini diikuti oleh pegawai Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel, serta pegawai Kanwil Hak Asasi Manusia Kalsel.

Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin, panitia menargetkan perolehan hingga 80 kantong darah, sejalan dengan usia pengabdian Kementerian Hukum yang menginjak 80 tahun pada 2025 ini.

Suasana kegiatan berlangsung lancar dengan partisipasi antusias dari seluruh peserta, mencerminkan semangat kepedulian dan kebersamaan di lingkungan Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Workshop Internasional Penegakan HKI



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) akan berpartisipasi dalam Workshop on Border Control and Intellectual Property Rights (IPR) Enforcement in the European Union and Southeast Asia yang digelar secara virtual pada 13–14 Agustus 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bekerja sama dengan IP Key South-East Asia dan European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Workshop bertujuan memperkuat pemahaman dan kapasitas aparatur penegak hukum, khususnya terkait pengendalian barang di perbatasan dan penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual.

Agenda kegiatan mencakup pembahasan tren dan modus pemalsuan terbaru, kerangka hukum pengendalian perbatasan di Indonesia dan Uni Eropa, hingga studi kasus operasional dari berbagai negara anggota Uni Eropa. Selain itu, sesi diskusi panel akan membahas tantangan dan peluang penegakan hukum HKI di kawasan Asia Tenggara.

Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, menyampaikan bahwa partisipasi dalam kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperluas wawasan dan jejaring kerja sama lintas negara.

“Pelatihan ini menjadi momentum bagi jajaran kami untuk memahami praktik terbaik internasional dalam penegakan hukum kekayaan intelektual, terutama di wilayah perbatasan. Dengan bekal pengetahuan ini, kami berharap penanganan pelanggaran HKI di daerah dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi,” ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam workshop ini, Kanwil Kemenkum Kalsel diharapkan mampu mengadopsi strategi penegakan hukum yang selaras dengan standar global sekaligus meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah Kalimantan Selatan.



Kakanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Rapat Paripurna DPRD Peringati Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu (13/08/2025) di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan persembahan kesenian daerah, yakni Tari Pusaka Batuah dari Sanggar Tari Nuansa Banjarmasin dan pertunjukan Madihin, dilanjutkan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta pembukaan rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD.

Acara juga diisi dengan pembacaan sejarah singkat Provinsi Kalimantan Selatan oleh Wakil Ketua DPRD, penandatanganan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2026, sambutan Gubernur Kalimantan Selatan, hingga penutupan dan pemotongan tumpeng bersama jajaran pimpinan daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan mengangkat tema “Bagawi Tuntung, Banua Baluntung, Rakyat Himung” sebagai pengingat akan perjalanan 75 tahun Banua sekaligus tekad membangun daerah yang berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera.

Usai kegiatan, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem sebagai kolaborasi bersama Forkopimda Kalimantan Selatan.

“Peringatan hari jadi ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi kemajuan Kalimantan Selatan. Kita semua punya peran untuk menjaga warisan, membangun prestasi, dan menyiapkan Banua yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ungkapnya.



Kanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Pembukaan IPxpose Indonesia 2025, Dorong Karya Kreatif Anak Bangsa



Jakarta, KI_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, mengikuti pembukaan kegiatan IPxpose Indonesia Tahun 2025 yang mengusung tema “Memajukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa”. Acara ini berlangsung pada Rabu (13/8) di Convention Hall Smesco, Jakarta.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu dalam laporannya menyampaikan bahwa sesuai Asta Cita ketiga, kekayaan intelektual (KI) merupakan motor pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara. Dalam satu dekade terakhir, KI di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Namun demikian, perkembangan ini juga diiringi sejumlah tantangan, seperti maraknya pelanggaran KI di era digital, serta perlunya regulasi dan penegakan hukum yang adaptif terhadap penggunaan Artificial Intelligence (AI).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pemanfaatan sertifikat KI, khususnya merek, sebagai jaminan kredit. Menurutnya, kekayaan intelektual yang kuat adalah motor penggerak ekonomi kreatif. Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi inisiator terwujudnya sistem platform digital pengelolaan royalti internasional melalui Protokol Jakarta, yang akan disampaikan pada Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 WIPO di Jenewa pada Desember 2025.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula launching Program Pemberian Kredit bagi UMKM berbasis KI serta penyerahan WIPO International Award. Acara ini turut dihadiri Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Director General WIPO, Wakil Menteri Hukum, para Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama Pusat, serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkum se-Indonesia.





Kunjungan Kakanwil Kemenkum Kalsel ke Wali Kota Banjarmasin Bahas Posbankum Hingga Kelurahan



Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka mendorong terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, melakukan kunjungan ke Wali Kota Banjarmasin, H.M. Yamin, pada Rabu, 13 Agustus 2025. Pertemuan berlangsung di kediaman rumah dinas Wali Kota Banjarmasin.

Kakanwil menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum merupakan salah satu program prioritas Kementerian Hukum, yang ditargetkan hingga tingkat Desa/Kelurahan. Keberadaan Posbankum diharapkan dapat mendekatkan akses keadilan dan menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi masyarakat, sekaligus menyelesaikan sengketa atau perselisihan ringan tanpa harus berproses ke aparat penegak hukum.

Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku efektif pada 2026.

“Posbankum adalah wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan pelayanan hukum hingga ke tingkat kelurahan. Kami ingin memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah, cepat, dan terjangkau,” ujar Alex.

Kepala Divisi P3H menambahkan, saat ini Kota Banjarmasin memiliki 52 kelurahan, namun baru 15 yang membentuk Posbankum. Untuk itu, pihaknya berharap dukungan Wali Kota dalam mendorong seluruh kelurahan menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Posbankum.

Wali Kota Banjarmasin menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk segera menginstruksikan seluruh lurah agar membentuk Posbankum di wilayah masing-masing.

“Kemenkum adalah mitra strategis Pemkot Banjarmasin dalam mendukung pelayanan hukum, penyusunan produk hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Kami siap bekerja sama dan meminta pendampingan dari Kemenkum dalam pembangunan hukum di Kota Banjarmasin,” ujar Yamin.



Pejabat Fungsional PK/APK APBN Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Penyusunan HEK/DEK Semester I Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Pejabat Fungsional Penata Keuangan (PK) dan Analis Pengelolaan Keuangan (APK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja (HEK) dan Daftar Evaluasi Kinerja (DEK) Semester I Tahun 2025 pada Rabu (13/08). Kegiatan dilaksanakan secara daring dan luring yang berpusat di Auditorium BPSDM Kementerian Hukum, Depok, Jawa Barat, dan diikuti daring di Ruang Rapat Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenkum Kalsel. Peserta dari Kanwil Kemenkum Kalsel terdiri dari Ketua Tim Kerja Bidang Keuangan Yansurullah, JF APK APBN Ahli Muda, JF PK APBN Mahir, serta calon JF PK APBN.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro SDM Kementerian Hukum, Fajar Sulaiman, yang menyampaikan pentingnya penyusunan HEK/DEK sebagai instrumen penilaian kinerja bagi pejabat fungsional. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan profesionalisme serta penyesuaian terhadap regulasi terbaru dalam pengelolaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara.

Pada hari pertama, kegiatan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memaparkan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional. Dilanjutkan dengan paparan dari Kementerian Keuangan mengenai peningkatan pemahaman jabatan fungsional di bidang keuangan, termasuk latar belakang dan desain jabatan fungsional Kementerian Keuangan, serta substansi Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis jabatan fungsional keuangan negara.

Sesi kedua diisi oleh Biro SDM Kementerian Hukum yang membahas secara rinci mekanisme penyusunan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional, termasuk proses konversi angka kredit melalui aplikasi e-Jafung. Melalui kegiatan ini, diharapkan pejabat fungsional PK/APK APBN Kanwil Kemenkum Kalsel dapat meningkatkan pemahaman teknis serta akurasi dalam penyusunan HEK/DEK, sehingga mendukung pengelolaan kinerja yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.



Kanwil Kemenkum Kalsel Gelar Senam dan Jalan Santai Meriahkan Hari Pengayoman ke-80

Banjarmasin, Humas_Info – Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggelar kegiatan senam dan jalan santai pada Kamis (14/08) pagi di halaman kantor.

Acara dimulai dengan acara senam pagi bersama yang kemudian dilanjutkan dengan jalan santai. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, Kepala Kanwil Ditjenpas Kalsel, Mulyadi, dan Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalsel, Karyadi. Hadir pula Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Hukum Kalsel, pejabat struktural dan pegawai dari Kanwil Kemenkum Kalsel, Kanwil Ditjenpas Kalsel, Kanwil Ditjenim Kalsel, Kanwil HAM Kalsel, serta perwakilan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Kalimantan Selatan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Provinsi Kalimantan Selatan, Assa Rent Banjarmasin, dan Pimpinan Cabang BRI Samudra.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyehatkan tubuh, tetapi juga mempererat tali silaturahmi lintas unit kerja.

“Kegiatan ini merupakan sarana kita untuk berolahraga dan silaturahmi bersama teman-teman, saudara kita baik dari Ditjenpas, Ditjenim, maupun Kanwil HAM. Harapannya setelah ini kita memiliki semangat baru, terutama dalam bekerja,” ungkap Alex.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan hiburan dan pengundian doorprize yang semakin menambah kemeriahan suasana. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan baik dan lancar, meninggalkan kesan kebersamaan yang hangat di antara para peserta kegiatan yang hadir.



Kemeriahan Sesi Hiburan dan Doorprize Warnai Peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info – Setelah menggelar senam bersama dan jalan santai, kemeriahan peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) pada Kamis (14/08) semakin memuncak dengan sesi hiburan dan pembagian doorprize.

Berbagai penampilan musik dan interaksi hangat antara panitia dan peserta yang hadir menciptakan suasana penuh tawa dan keceriaan. Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, juga turut menyerahkan beberapa hadiah utama secara langsung kepada pemenang, menambah semangat peserta.

"Doorprize ini bukan hanya soal hadiah, tetapi bagian dari kebersamaan dan rasa syukur kita di momentum Hari Pengayoman. Semoga semangat ini terus terjaga di lingkungan kerja kita," ujar Alex.

Deretan bingkisan mulai dari peralatan rumah tangga, voucher belanja, hingga perangkat elektronik berhasil dibawa pulang oleh peserta beruntung. Dukungan dari para mitra seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kalimantan Selatan, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Provinsi Kalimantan Selatan, Assa Rent Banjarmasin, dan Pimpinan Cabang BRI Samudra turut memeriahkan sesi undian ini.

Acara hiburan dan pembagian doorprize menjadi penutup manis rangkaian kegiatan Hari Pengayoman ke-80 di Kanwil Kemenkum Kalsel. Kemeriahan, canda, dan semangat kebersamaan yang tercipta diharapkan menjadi energi positif untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.





Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Ikuti Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Tertib Proses Pewarganegaraan



Banjarmasin, Humas _Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, melalui Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Dewi Woro Lestari beserta jajaran, mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Hukum Nomor M.HH-AH.10.02-134 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Proses Pewarganegaraan pada Kamis (14/8), yang digelar secara daring dari Ruang Rapat Tata Usaha dan Umum.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Edaran Menteri Hukum yang mengatur langkah-langkah terstruktur dalam pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pewarganegaraan. Acara dibuka dengan sambutan Direktur Tata Negara, Dulyono dan penyampaian materi oleh narasumber Backy Krisnayuda (Kasubdit Kewarganegaraan) dengan moderator Faraitody Rinto Hakim (Analisis Hukum Ahli Muda).

Dalam paparannya, Backy Krisnayuda menjelaskan bahwa proses pemeriksaan pewarganegaraan dilakukan secara administratif dan substantif mulai dari Kantor Wilayah hingga ke Direktorat Jenderal AHU, dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian. Ia menekankan pentingnya memastikan pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur, memperhatikan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa pemohon tidak sedang menjalani proses hukum baik di Indonesia maupun di negara asalnya.

Selain itu, narasumber juga memaparkan ketentuan mengenai pengembalian dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian setelah pengucapan sumpah atau janji setia. Pemohon diwajibkan mengembalikan dokumen kewarganegaraan kepada kedutaan besar negara asal atau surat-surat keimigrasian kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 hari kerja. Proses pengembalian tersebut harus dibuktikan dengan tanda terima resmi dari Kedutaan Besar atau Surat Keterangan Pencabutan Dokumen Keimigrasian yang dilegalisir oleh instansi terkait.

Materi sosialisasi juga menegaskan peran penting Kantor Wilayah dalam menyerahkan petikan Keputusan Presiden dan Berita Acara Sumpah kepada pemohon hanya setelah semua bukti pengembalian dokumen telah terpenuhi. Seluruh dokumen kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum melalui Ditjen AHU baik secara elektronik maupun non-elektronik.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh Kantor Wilayah, termasuk Kanwil Kalsel, dapat melaksanakan proses pewarganegaraan secara tertib, seragam, dan transparan, sehingga kualitas pelayanan publik di bidang kewarganegaraan semakin meningkat dan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Workshop Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Perbatasan



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mengikuti Workshop on Border Control and IPR Enforcement in the European Union and Southeast Asia yang diikuti secara daring pada Kamis (14/08) dari di Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan IP Key South-East Asia dan European Union Intellectual Property Office (EUIPO), dengan peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Wilayah seluruh Indonesia, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, serta tim teknis terkait.

Workshop hari kedua ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur terkait strategi, sistem, dan praktik terbaik dalam pengendalian perbatasan dan penegakan hukum Kekayaan Intelektual, khususnya dalam upaya pencegahan peredaran barang yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Salah satu materi dibawakan oleh Ms. Andrea Gróf yang membahas sistem manajemen risiko yang digunakan negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengidentifikasi barang yang berpotensi melanggar KI di pintu masuk perbatasan. Selain itu, Ms. Bérengère Dréno memaparkan mengenai perangkat dan basis data yang dimanfaatkan otoritas kepabeanan Uni Eropa dalam mendukung penegakan hukum KI. Ms. Andrea Gróf juga kembali menekankan pentingnya pertukaran informasi dan kerja sama lintas batas antara otoritas bea cukai dan lembaga penegak hukum di tingkat regional maupun internasional.

Kabid Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel, Riswandi, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan yang sangat bermanfaat dalam memperkaya strategi pencegahan dan penindakan pelanggaran KI di pintu masuk wilayah Indonesia. Menurutnya, sinergi yang terjalin dengan bea cukai, aparat penegak hukum, dan pemegang hak akan memperkuat perlindungan KI di daerah. Hasil workshop ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan sebagai tindak lanjut untuk memperkuat kebijakan dan koordinasi penegakan hukum KI di Kalimantan Selatan.





Kanwil Kemenkum Kalsel Harmonisasi Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan HST



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Kamis (14/8) di Balai Pertemuan Garuda.

Kegiatan ini dipimpin Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel karena pembahasan Ranperda ini sejalan dengan tema Analisis dan Evaluasi (Anev) yang diangkat Kanwil Kemenkum Kalsel tahun ini.

Hadir pula Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Taufik Rahman, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, dan BPKAD Kab. Hulu Sungai Tengah.

Perubahan kedua Ranperda ini dilakukan untuk menyesuaikan penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023–2042. Dalam rancangan tersebut, kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan ditetapkan seluas 34.358,49 hektar yang tersebar di 11 kecamatan, serta lahan cadangan seluas 10.384,73 hektar di beberapa wilayah strategis.

Anton Edward Wardhana menegaskan bahwa harmonisasi Ranperda ini penting untuk memastikan kepastian hukum, keselarasan dengan tata ruang wilayah, dan perlindungan sumber daya pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah.





Kemenkum Kalsel Hadiri Puncak Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel



Banjarbaru, Humas_Info – Puncak peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan berlangsung meriah di Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Kamis (14/8/2025). Dalam kesempatan ini, Danang Agung Nugroho selaku Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut menghadiri rangkaian acara tersebut.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, didampingi Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman dan Sekretaris Daerah M. Syarifuddin, mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur dan bergembira atas perjalanan panjang provinsi yang telah memasuki usia ke-75 tahun.

“Dirgahayu Provinsi Kalimantan Selatan ke-75. Semoga kita semua diberi kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya demi kemajuan daerah tercinta,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Muhidin menekankan pentingnya mengenang jasa para pejuang serta memperkuat semangat kebersamaan antara pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh elemen rakyat demi membangun daerah. Ia juga memaparkan capaian pembangunan yang membanggakan, di antaranya surplus beras selama belasan tahun, tidak adanya desa tertinggal, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang rendah, meningkatnya indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Kalsel pun menjadi provinsi tercepat dalam mengusulkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, dan sukses meraih pengakuan internasional sebagai UNESCO Global Geopark Meratus. Provinsi ini juga memperoleh apresiasi Pemerintah Pusat atas kebijakan Desa Anti-Maladministrasi.

Pada momentum tersebut, Gubernur juga menyerukan aksi nyata menjaga lingkungan, terutama pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kita jaga lahan kita bersama. Hindari membuka lahan dengan membakar. Ini tanggung jawab kita semua,” tegasnya.

Selain itu, Muhidin memberikan apresiasi kepada para petani muda yang terus berinovasi dalam pengelolaan lahan pertanian. Pemerintah Provinsi pun menghadirkan program sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM, mendukung kebijakan nasional bahwa seluruh produk UMKM harus berlabel halal pada 2026, serta mengoperasikan Pusat Pelayanan Kemasan Provinsi untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MPG).

Peringatan Hari Jadi ke-75 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan dan optimisme menuju masa depan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan, tangguh dalam ketahanan pangan, unggul dalam budaya, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

“Optimisme masa depan Kalsel bukan sekadar angan-angan. Ini nyata dan sedang kita wujudkan bersama,” tutup Gubernur.

Harmonisasi Ranperda Pembiayaan Tahun Jamak Pembangunan Bendungan Pancur Hanau Digelar di Kanwil Kemenkum Kalsel

Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan turut membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembiayaan Tahun Jamak Perencanaan Pembangunan Bendungan Pancur Hanau dalam rapat harmonisasi yang dilaksanakan Kamis (14/8) di Balai Pertemuan Garuda.

Rancangan ini disusun untuk mempercepat pembangunan Bendungan Pancur Hanau sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus mengatasi permasalahan banjir di wilayah tersebut. Pembangunan akan dilaksanakan melalui skema pembiayaan multiyears yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan tahapan pekerjaan meliputi review studi kelayakan, penyusunan desain teknik terinci (detail engineering design), pemetaan topografi, kajian geologi dan geoteknik, analisis hidrologi, penyusunan dokumen AMDAL, hingga sertifikasi bendungan.

Kegiatan harmonisasi ini dipimpin Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Eryck Yulianto, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel. Hadir pula Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Taufik Rahman, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, dan BPKAD Kab. Hulu Sungai Tengah.

Anton Edward Wardhana menegaskan bahwa penyusunan Ranperda ini harus memperhatikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis daerah.





Perancang UU, Analis dan Penyuluh Kompak, Perda Ketenteraman dan Ketertiban Kalsel Perlu Pembaruan



Banjarasin, P3H_Info — Diskusi analisa dan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dari perspektif Hak Asasi Manusia mengemuka di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, Kamis (14/08/2025).

Dalam forum yang menghadirkan Erlina, akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, disorot bahwa sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut dinilai sudah tidak relevan baik secara sosiologis maupun yuridis.

“Banyak pasal dalam Perda ini yang sifatnya membatasi hak warga, namun tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang kuat dan responsif. Secara sosiologis, beberapa aturan juga sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat Kalsel saat ini, Perda tidak memberikan alternatif solusi seperti program pemberdayaan atau jaminan sosial sebelum menerapkan sanksi, sehingga pendekatannya lebih represif daripada responsif.” ujar Erlina dalam paparannya.

Ia menekankan bahwa penerapan Perda harus mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, hak berkumpul, dan hak mendapatkan rasa aman tanpa diskriminasi.

Menanggapi paparan tersebut, Sri Yunita, Analis Hukum Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel, menilai bahwa revisi Perda menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. “Ada pasal-pasal yang potensial bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Ini berisiko menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, seperti larangan pengobatan tradisional,” jelasnya.

Sementara itu, M. Novi Saputra, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda, menambahkan bahwa evaluasi juga harus memerhatikan aspek perumusan norma. “Banyak ketentuan yang multitafsir, sehingga rawan disalahgunakan dalam penegakan di lapangan, sebaiknya untuk sanksi pidana ditiadakan karena seharusnya mengekor kepada KUHP yang baru nanti,” tegasnya.

Dianor, Penyuluh Hukum Muda, lebih menyoroti sisi penerapan di masyarakat. “Secara teknis, pelaksanaan Perda ini di lapangan sering menimbulkan resistensi karena tidak semua warga memahami tujuan dan batasan aturannya, walau terlihat baik-baik saja sampai sekarang,” ungkapnya.

Dari hasil diskusi, disepakati bahwa Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2020 perlu segera direvisi, karena banyak ketentuan yang tidak lagi relevan baik dari segi sosiologis maupun yuridis, serta kurang memperhatikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Forum ini dihadiri oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel, akademisi dari Fakultas Hukum ULM, dan pegiat dari Pusat Studi HAM ULM.

Kemenkum Kalsel Laksanakan Koordinasi Bersama Bagian Hukum Setda Kab. Banjar dan Barito Kuala, Bahas Pembentukan Posbankum



Banjar, P3H_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) melaksanakan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, Jumat (15/08/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pembangunan hukum di wilayah Kalimantan Selatan.

Fokus pembahasan diarahkan pada pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kalimantan Selatan. Langkah ini diambil untuk memperkuat dan memudahkan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Posbankum di tingkat desa/kelurahan diharapkan menjadi strategi efektif dalam memberikan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau, menjadi wadah penyelesaian sengketa, meningkatkan kesadaran hukum, serta menyediakan pendampingan hukum.

Posbankum menyediakan beberapa layanan penting bagi masyarakat, antara lain layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, penyelesaian konflik/sengketa melalui mediasi, serta layanan rujukan hukum.

Saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan telah teregister 98 Posbankum, sementara jumlah desa dan kelurahan mencapai 2.008. Kondisi ini menuntut langkah strategis dan kolaborasi lintas instansi untuk memperluas pembentukan Posbankum.

Koordinator Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Dianor, menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah daerah akan segera melakukan audiensi guna membahas pembentukan Posbankum di seluruh kabupaten/kota.

“Ke depan kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembentukan Posbankum. Hari ini, melalui koordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, kami sudah menjadwalkan audiensi dalam waktu dekat. Tentunya, pembentukan Posbankum akan terus berlanjut di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” ujar Dianor.

Senada dengan itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Kuala, Mety Monita, menegaskan dukungan terhadap program tersebut.

“Kami akan mendukung pembentukan Posbankum, mengingat manfaatnya yang besar bagi masyarakat. Untuk itu, kami akan menindaklanjuti dan segera melaporkannya kepada pimpinan,” kata Mety.

Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyatakan komitmennya untuk mendorong pembentukan Posbankum di seluruh desa/kelurahan di Kalimantan Selatan.

“Dengan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik antarinstansi, saya optimistis Posbankum dapat terbentuk di setiap desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan,” tegas Alex.

Maknai Kemerdekaan dalam Persatuan, Kemenkum Kalsel Gelar Upacara HUT ke-80 RI



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenham Kalsel) melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8). Kegiatan berlangsung khidmat di Lapangan Upacara Kanwil Kemenkum Kalsel dan dihadiri jajaran pegawai serta Dharma Wanita Persatuan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM, Karyadi, mendapat kehormatan membacakan Naskah Proklamasi. Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, serta para pejabat struktural dan pegawai dari Kanwil Kemenkum Kalsel dan Kanwil HAM Kalsel.

Dalam amanatnya, Alex Cosmas Pinem membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ia menyampaikan bahwa kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan bangsa yang harus dijaga sebagai amanah untuk generasi penerus.

Lebih lanjut, terdapat empat makna kemerdekaan yang ditekankan dalam pelaksanaan tugas Kemenko, yakni: hukum yang tegak lurus, adil, dan dipercaya rakyat; penghormatan serta perlindungan HAM warga negara; pelayanan dan pengawasan keimigrasian sebagai pintu gerbang negara; serta pemasyarakatan yang menekankan perlakuan manusiawi dan rehabilitasi warga binaan.

“Sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo, kita berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang kuat dan bermartabat. Kemerdekaan adalah warisan berharga yang harus dijaga dan diwariskan dalam kondisi yang lebih baik. Untuk itu kita harus bekerja keras, bersinergi, dan memberikan pelayanan publik terbaik demi rakyat yang sejahtera,” ujar Alex saat menyampaikan amanat upacara.

Pada momentum upacara HUT ke-80 RI ini juga dilaksanakan penyerahan gelar tanda jasa pengabdian kepada pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Pemberian penghargaan ini menjadi simbol apresiasi sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus berkarya dan menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Usai kegiatan, Kakanwil Alex Cosmas Pinem juga memberikan pesan khusus kepada jajaran.

“Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini harus menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian kita. Mari kita wujudkan nilai-nilai kemerdekaan itu dalam kinerja sehari-hari, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga integritas sebagai aparatur negara,” tegasnya.

Kegiatan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini berlangsung lancar dan penuh khidmat, dimeriahkan dengan kehadiran para peserta upacara yang mengenakan ragam pakaian adat, mencerminkan kekayaan budaya Indonesia serta memaknai kemerdekaan dalam bingkai persatuan.

Kakanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Upacara Bendera dan Peringatan Detik-detik Proklamasi di Kantor Gubernur Kalsel

Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi dan Penarikan Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8) di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Upacara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan, dengan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan ini juga diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, serta unsur pemerintah daerah.

Rangkaian upacara dimulai dengan peringatan Detik-Detik Proklamasi, dilanjutkan dengan pembacaan teks Proklamasi oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengheningkan cipta, pembacaan doa, dan puncaknya adalah pengibaran Bendera Merah Putih.

Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum untuk memperkuat tekad dalam mengabdikan kepada bangsa dan negara.

“Upacara Detik-Detik Proklamasi mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi kemerdekaan. Sebagai Insan Pengayoman, kita harus melanjutkan semangat perjuangan itu dengan bekerja penuh integritas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkap Alex.

Kehadiran Kakanwil Kemenkum Kalsel bersama jajaran instansi pemerintah lainnya menunjukkan sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga persatuan serta mengisi kemerdekaan dengan pengabdian bagi bangsa dan negara.



Wujud Sinergi Antar Instansi: Kemenkum Kalsel Ikuti Penyerahan Remisi Umum oleh Gubernur Kalsel di Lapas Banjarbaru



Banjarbaru, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, mengikuti kegiatan Penyerahan Remisi Umum dan Remisi Dasawarsa bagi Narapidana serta Pengurangan Masa Pidana Umum dan Dasawarsa bagi Anak Binaan, Minggu (17/8) di Lapas Kelas IIB Banjarbaru.

Kakanwil hadir bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah. Acara turut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi, serta pimpinan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam laporan kegiatan, Kakanwil Ditjenpas Kalsel selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa remisi ini merupakan bentuk apresiasi negara bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI bagi WBP yang memenuhi syarat serta disiplin dalam mengikuti program pembinaan. Tahun ini, sebanyak 6.780 WBP dan 27 Anak Binaan di Kalimantan Selatan berhak menerima remisi.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam sambutannya membacakan pesan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang menekankan bahwa remisi bukanlah hadiah, melainkan hak bersyarat yang diberikan sebagai dukungan moral agar narapidana semakin bersemangat menjalani pembinaan.

“Semoga remisi ini membawa kebaikan bagi yang menerima, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri,” demikian pesan Menteri yang disampaikan Gubernur.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan semua pihak.

“Penyerahan remisi ini bukan hanya bentuk penghargaan negara, tetapi juga wujud nyata sinergi antar instansi dalam membina warga binaan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat, kami optimis program pembinaan dapat semakin efektif sehingga WBP bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik,” ujarnya.

Gubernur juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung dan berpartisipasi dalam pembinaan WBP, termasuk jajaran instansi vertikal, pemerintah daerah, serta masyarakat luas yang terlibat aktif dalam program pembinaan di Lapas dan Rutan.

Kemenkum Kalsel Hadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Provinsi Kalimantan Selatan



Banjarbaru, Humas_Info – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada Minggu (17/8/2025) sore bertempat di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.

Kegiatan dimulai pada pukul 16.50 WITA dan berlangsung dengan khidmat. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara ini diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan instansi vertikal, serta unsur pemerintah daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, turut hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran lagu-lagu daerah, dilanjutkan dengan prosesi sakral penurunan Bendera Merah Putih, pembacaan doa sebagai rasa syukur lancarnya kegiatan yang berlangsung, dan diakhiri dengan penutup.

Momentum ini menjadi pengingat penting akan nilai-nilai perjuangan para pahlawan serta semangat kebangsaan yang terus dijaga oleh masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk Kemenkum Kalsel yang senantiasa hadir dalam setiap momen kebangsaan.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ajak Ikuti Webinar Nasional Anti Korupsi



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengajak seluruh jajaran, mitra kerja, serta masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam *Webinar Nasional Anti Korupsi* yang akan digelar pada Selasa, 19 Agustus 2025 pukul 08.00 WIB.

Mengusung tema “Integritas dan Anti Korupsi: Dari Kesadaran Menjadi Kebiasaan”, webinar ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai pembuka, serta Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T., Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK sebagai narasumber utama. Acara ini akan dipandu oleh moderator Yulia Wiranti, Penyuluh Hukum Madya BPHN Kemenyerian Hukum. Kegiatan akan berlangsung di Graha Pengayoman, Jakarta, dan dapat diikuti secara daring melalui platform Zoom dan kanal YouTube resmi.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa webinar ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran anti korupsi, terutama di lingkungan Kementerian Hukum maupun masyarakat luas.

“Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan. Melalui webinar ini, kami berharap nilai-nilai integritas tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama kita sukseskan kegiatan ini sebagai wujud komitmen membangun budaya anti korupsi,” ungkap Alex.

Kanwil Kemenkum Kalsel mengajak seluruh pegawai, instansi pemerintah daerah, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum untuk ikut serta menyimak dan mengambil manfaat dari kegiatan edukatif ini.



**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/@kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id